

E-READINESS PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT (Studi Terhadap Kepri Smart Province)

Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri & Eki Darmawan

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

na_dwiputri@yahoo.com / ekldarmawan75@yahoo.co.id

ABSTRAK

Smart Province merupakan bagian dari usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai ke area terkecil Desa mampu berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak Mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan dan menciptakan dan berbagi manfaat untuk masing-masing pihak yang berkolaborasi. Melihat fenomena ini perlu dilakukan pengukuran kesiapan dan upaya dari semua stakeholder sudah sejauh mana usaha dalam mencapai keberhasilan dari E-Government tersebut. Pengukuran e-readiness merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan smart government. Kepri Smart Province yang merupakan pengejawantahan dari wujud pelaksanaan e-government di provinsi kepulauan riau masih belum siap (ready) baik dari factor teknologi, institusional maupun factor manusia.

Kata Kunci : e-readiness,e-government,kepri smart province

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi berbasis komputer dan jaringan internet dapat menunjang pembuatan-pembuatan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dapat diselesaikan secara cepat, akurat, dan efisien. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah membangun "Kepri Smart Province" untuk mempercepat pembangunan di wilayah itu secara efisien dan efektif.

Sistem pelayanan masyarakat beralih basis IT akan terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau dan terkoneksi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Langkah ini diharapkan akan menjadi upaya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi. Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003, Pengembangan e-Gov merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Kepri Smart Province merupakan teknologi informasi yang terpadu / integral, dimana masyarakat bisa mendapat akses informasi sesuai asas kesetaraan hak akses sebagai cara meningkatkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Riau. E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini terintegrasi melalui KIIS (Kepri Integrated Information System) yang berbasis di Dinas Kominfo.

Ada beberapa sistem informasi dari delapan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terintegrasi, diantaranya :

1. e-Planning dari BAPPEDA yang berisikan pagu RKPD dan pagu PPAS,
2. e-SImda dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKKD), yang berisikan pagu DPA dan realisasi OPD, SIPAMOR dari BP2KD, yang menampilkan data pendapatan pajak kendaraan bermotor pada setiap Samsat per di hari di Provinsi Kepri.
3. Masyarakat juga dapat melihat rencana umum pengadaan dari masing-

masing OPD, melalui SIRUP yang dikembangkan Biro Layanan Pengadaan (LPSE). OPD ini juga mengintegrasikan aplikasi SPSE hingga masyarakat dapat melihat langsung data pelelangan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik.

4. Selain itu juga ada TEPRRA dari Biro Administrasi Pembangunan, SILAT dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
5. PTSP dari Badan Penanaman Modal dan ,
6. SIMRS dari RSUD Batu 8 dan Cek Dare dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Aplikasi tersebut tidak hanya dapat dipantau melalui monitoring room KIIS di Dinas Kominfo, juga terhubung ke Ruang Kerja Gubernur, Ruang Kerja Sekda dan Kepri Digital Gateway (KDG) yang berlokasi di Aula Kantor Gubernur Lama.
8. Disamping itu Dinas Kominfo juga meluncurkan Sembilan produk terbaru yaitu, Kepri Smart Province (KSP), Kepri Digital Gateway (KDG), co-working space (CWS), Kepri Digital Exhibition (KDE), Kepri Cyber System (KCS), Kepri Information Security (KeRIS), Kepri Smart Conference (KSC) dan PakDin Asik.

Program tersebut adalah salah satu cara dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik

kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Smart Province merupakan bagian dari usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai ke area terkecil Desa untuk dapat berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan dan menciptakan dan berbagi manfaat untuk masing-masing pihak yang berkolaborasi.

Integrasi pada sistem pemerintahan dilakukan agar seluruh data dan informasi yang digunakan pimpinan daerah (Gubernur) pada saat mencanangkan suatu kebijakan dilakukan berdasarkan data yang terkini sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan bermanfaat dan menghindari adanya redundansi / duplikasi data. Namun pada kenyataannya regulasi terkait penerapan Kepri Smart Province ini belum didukung oleh regulasi-regulasi yang mengatur terkait penerapan teknologi informasi ini sehingga nantinya hanya akan menjadi teknologi yang belum ada dasar SOP dan Kebijakan lainnya mengatur hal tersebut.

Bertitik tolak dari pemaparan tersebut, maka SMART bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keamanan dokumen yang diarsipkan. Pengalaman beberapa negara dalam menerapkan program smart city (Government of India, 2015; Giffinger, et.al, 2007; Shapiro, 2006; Van Hove, 2001) menegaskan bahwa penting bagi sebuah kota untuk memiliki visi yang jelas dalam implementasi program smart city. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam fokus bidang atau aspek yang akan dikembangkan melalui program

smart city.

Konsep smart government menengahkan sebuah tatanan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan umum melalui pemanfaatan TIK secara efektif dan efisien . Melihat fenomena penerapan e-government yang umumnya terjadi kita menyadari bahwa suksesnya penerapan e-government tersebut tidak hanya berkaitan pada pemenuhan infrastruktur TIK semata. Tidak sedikit inisiatif e-government yang berakhir dengan kegagalan karena keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut hanya didasarkan pada trend yang sedang berkembang.

Dalam upaya menghindari atau setidaknya meminimalisir kegagalan tersebut, penerapan e-government harus dimulai dengan membentuk kesiapan diri suatu organisasi, yang mana tingkat kesiapan tersebut ditunjukkan dari hasil pengukuran e-readiness. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji kesiapan atau e-readiness pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam penerapan e-government.

TINJAUAN PUSTAKA

E-Government Menurut Akadun (2009, h.130) Electronic administration berkembang dengan mengadopsi electronic business, electronic commerce, electronic market. Yang lebih dulu mengaplikasikan teknologi tersebut dalam institusi bisnis dengan menggunakan jasa internet. Pelaksanaan electronic government dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya *electronic government* menurut Indrajit (2002, h.5) antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan perubahan global dan trend yang ada; serta
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

E-Government adalah merupakan salah satu bentuk Inovasi bagi pelayanan publik. Inovasi adalah merupakan salah satu wujud dari adanya reformasi birokrasi. Penyakit-penyakit birokrasi yang selama ini selalu menjadi penyebab lambannya proses administrasi secara perlahan mulai berubah dengan adanya reformasi birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik . Pemerintah mulai berinovasi agar tercipta pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien .Adapun pengertian dari pada Inovasi itu sendiri adalah merupakan sebuah proses dimana beberapa individu atau sekelompok orang mengidentifikasi masalah yang dianggap paling krusial kemudian mengembangkan solusi terhadap masalah tersebut. Tidak hanya solutif tetapi juga dapat menghasilkan kontribusi signifikan bagi peningkatan terhadap

efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik (Howie dalam Howie 2016 : 35).

Efisiensi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik adalah merupakan salah satu aspek yang penting, menurut Thamrin (2013 : 90) ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat antara lain : a) persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada syarat- syarat yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan output (hasil), b) harus dicegah terjadinya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan dipersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait, c) hasil (output) pelayanan yang diterima oleh masyarakat tidak menuntut biaya di luar ketentuan yang berlaku, d) kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar, dan e) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan efektif itu sendiri berkaitan dengan ketepatan waktu dalam penyelenggaraannya seperti adanya standar operasional dan prosedur untuk masing-masing layanan yang diberikan.

Di zaman yang sudah modern ini alternatif untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien adalah dengan bantuan dari teknologi. Pemerintah dapat menerapkan konsep pemerintahan berbasis elektronik dalam meningkatkan pelayanan. Adapun pengertian dari pada e-government menurut Bank Dunia dalam Indrajit (2004 :2) adalah berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti : wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain : pemberian

layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industry, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintah lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, penambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya.

Menurut Indrajit (2004 : 5) manfaat dari pada diterapkannya konsep e-government bagi suatu Negara, antara lain:

- Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industry) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakehodernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta
- Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan berbagai manfaat yang diberikan oleh e-government tentunya sangat

membantu pemerintah, namun untuk Negara berkembang seperti Indonesia penerapan e-government itu sendiri masih berjalan lambat. Ada beberapa elemen sukses menurut Indrajit (2004) dari pada manajemen proyek e-government antara lain :

a. *Political environment*

Yang dimaksud dengan elemen ini adalah keadaan atau suasana politik dimana proyek yang bersangkutan berada atau dilaksanakan. Berdasarkan hasil kajian, ada dua tipe proyek sehubungan dengan hal ini. Pertama "Top Down Project" (TDP) dimana eksistensi sebuah proyek ditentukan oleh adanya inisiatif dari lingkungan eksekutif (misalnya presiden atau perdana menteri) sebagai otoritas tertinggi pemerintahan, atau disponsori oleh kalangan legislatif (lembaga perwakilan rakyat) sebagai pemberi mandate. Kedua adalah "Bottom Up Projects" (BUP) yang dilaksanakan karena adanya ide atau inisiatif dari kepala unit atau karyawan (birokrat) yang berada di salah satu lembaga pemerintahan atau departemen.

b. *Leadership*

Ruang lingkup dari kepemimpinan untuk mengelola ada tiga hal, yaitu :

- Beragam tekanan politik yang terjadi terhadap proyek e-government yang berlangsung baik dari kalangan yang optimis maupun yang pesimis;
- Berbagai macam sumber daya yang dibutuhkan dan dialokasikan oleh proyek e-government yang bersangkutan, seperti misalnya sumber daya manusia, finansial, informasi, peralatan, fasilitas dan lain sebagainya;
- Sejumlah kepentingan dari berbagai kalangan terhadap keberadaan proyek e-government yang dijalankan.

c. *Planning*

Perencanaan merupakan sebuah tahap yang sangat penting, karena pada tahap awal inilah gambaran menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif e-government diproyeksikan.

d. Stakeholders

Stakeholders disini adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap proyek penyelenggaraan proyek e-government terkait.

e. Transparency/visibility

Transparansi dalam proyek e-government sangat erat kaitannya dengan keberadaan stakeholder, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk-beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholders yang beragam tersebut.

f. Budgets

Bukanlah merupakan sebuah rahasia lagi bahwa kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek e-government merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhadil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek.

g. Technology

Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam sebuah proyek e-government sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia.

h. Innovation

Berkaitan dengan kemampuan untuk menciptakan ide-ide dan menerapkan ide-ide di dalam mengimplementasikan e-government terutama karena banyaknya stakeholder yang terlibat dan tingginya kompleksitas proyek terkait.

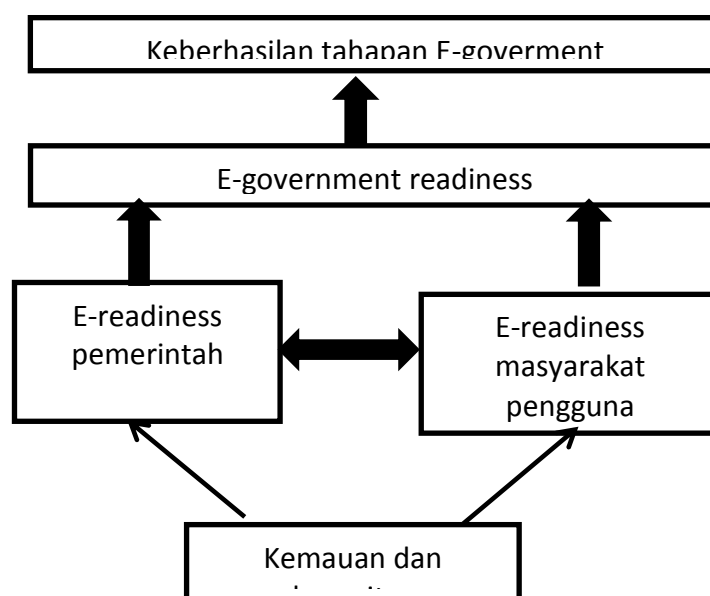
Selain delapan elemen sukses diatas terdapat juga maslaah pokok dalam

penerapan e-government seperti menurut aziz (2008) dalam seminar pelayanan publik dan e-government, terdapat tiga masalah pokok aplikasi e-government antara lain berkaitan dengan masalah budaya, kepemimpinan dan infrastruktur :

- Masalah yang berkaitan dengan budaya yaitu resistensi dan penolakan terhadap e-gov, kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap e-gov, serta tidak mau berbagi data dan informasi.
- Masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan yaitu konflik antara pusat dan daerah, peraturan, alokasi anggaran dan pembakuan.
- Serta masalah yang berkaitan dengan infrastruktur yaitu ketimpangan digital, infrastruktur tidak menunjang serta kurangnya sistem layanan

Selain ketiga masalah pokok diatas keberhasilan e-government juga ditentukan dari e-readiness pemerintah dan e-readiness masyarakat. Adapun pengertian e-readiness itu sendiri adalah merupakan kesiapan stakeholders dalam menerapkan e-government. Berikut ini adalah model e-government readiness menurut stevanus (2006)

Gambar 1. Model e-government readiness



Sumber : Stevanus (2006)

Sebuah *pre-condition* diperlukan untuk melakukan transformasi pemerintahan menuju e-government, kondisi ini dipahami sebagai e-readiness. Pengukuran e-readiness perlu dilakukan pada sektor pemerintah sebagai actor utama e-government maupun pada masyarakat sebagai pengguna. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi E-Readiness yaitu; Faktor Teknologi, Faktor Instiusional dan Faktor manusia atau dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1 Faktor-Faktor E-Readiness

Faktor Teknologi	Faktor Manusia	Faktor Instiusional
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan (Availability) • Keandalan (Reliability) • Penetrasi Internet (Ketercakupan) • Biaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat • Pendidikan • Kompetensi TIK 	<ul style="list-style-type: none"> • Online Service • Integrasi • Willingness (Political Will) • Kebijakan Anggaran • Kebijakan program • Intsrumen Hukum

Sumber : Nento, 2017

Ketika kesiapan atau *e-readiness* dapat diketahui melalui faktor-faktor diatas maka selanjutnya kita akan dapat melihat kesiapan baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna serta celah yang harus diperbaiki dan lebih diperhatikan oleh pemerintah guna keberhasilan penerapan e-government tersebut.

E-Government readiness merupakan bentuk kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja pemerintahan dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat metode evaluasinya, analisis *e-readiness* meliputi: infrastruktur

teknologi, penggunaan atau adopsi TI dalam masyarakat maupun bisnis, kapasitas SDM, kebijakan pemerintah dan perkembangan bisnis sector Teknologi Informasi.

METODE PENELITIAN

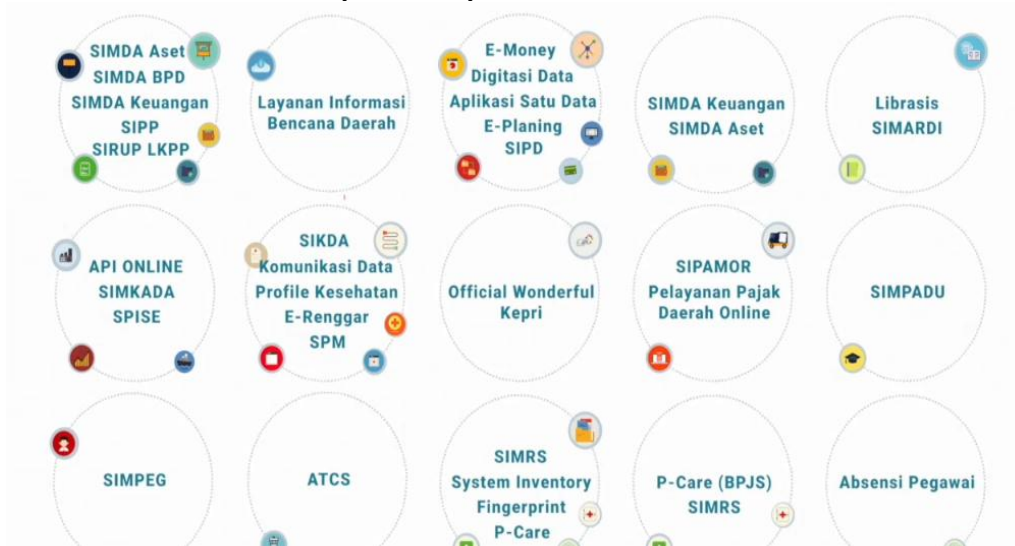
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dimana dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjangkaran informasi dari kondisi sewajarnya kemudian dihubungkan dengan pemecahan masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan digunakannya penelitian kualitatif dapat memperoleh dan menganalisa data lebih dalam yang didapat melalui wawancara. Selanjutnya pengolahan data dilakukan secara kualitatif dimana setiap data yang ada akan dikonversi ke dalam deskripsi analisa kesiapan berdasarkan faktor.

PEMBAHASAN

Kepri Smart Province merupakan gagasan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau yang pintar berbasis digital multimedia dengan mempermudah pekerjaan pemerintahan dan layanan publik. Kepri Smart Province terdiri dari 36 aplikasi dari 15 OPD.

Gambar IV.1
Aplikasi Kepri Smart Province



Sumber: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Aplikasi-aplikasi Kepri Smart Province tersebut diharapkan membantu pekerjaan pemerintahan dan layanan publik. Selanjutnya di dalam Kepri Smart Province terdapat PPID, yang mana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dikelola dengan berbasis digital seperti data keuangan, informasi barang dan jasa, informasi layanan public, gambaran umum Kepulauan Riau, rencana strategis, dan visi misi. Pengelolaan data berbasis digital sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi seputaran Kepulauan Riau bisa langsung mengksesnya.

Kemudian di dalam KSP terdapat Kepri Creative Hub (KCH) yang bertujuan untuk mendapatkan ide-ide kreatif yang muncul dari masyarakat untuk dijadikan usaha sendiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Bukan hanya aplikasi, PPID dan KCH akan tetapi Youtube, Live Streaming, Social Media juga membantu mewujudkan provinsi yang pintar berbasis digital yang menjadi gagasan dari Kepri Smart Province.

Kesiapan pemerintah dalam penerapan E-Government atau dapat dilihat E-Readiness pemerintah terlebih dahulu sebagai dasar acuan pelaksanaan program berbasis teknologi. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi E-Readiness yaitu; Faktor Teknologi, Faktor Institusional dan Faktor manusia.

Faktor Teknologi

Teknologi menawarkan kesempatan untuk berbagi informasi, partisipasi publik, dan kolaborasi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi lebih banyak kepada publik dengan cara yang memungkinkan orang memahami apa yang pemerintah mereka lakukan dan untuk mempengaruhi keputusan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan ruang online yang mudah diakses dan aman sebagai platform untuk memberikan layanan, melibatkan masyarakat, dan berbagi informasi dan gagasan. Namun, akses teknologi yang adil dan terjangkau merupakan tantangan tersendiri, oleh karena itu diperlukan komitmen untuk mencari peningkatan konektivitas online dan mobile, sekaligus juga mengidentifikasi dan mempromosikan penggunaan mekanisme alternatif untuk keterlibatan warga negara (Maria, 2017: 21).

Keberhasilan dari penerapan E-Government pada Kepri *Smart Province* sangat bergantung pada perangkat teknologi yang tersedia. Pemanfaatan dan pengembangan e-gov sangat ditentukan dengan adanya dukungan teknologi yang handal pada setiap unit kerja, seperti banyaknya komputer yang tersedia, ketersediaan fasilitas jaringan internet, serta perangkat pendukung teknologi lainnya.

Tabel. VI.1 Sarana dan Prasarana Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
----	----------------------	--------

1	Komputer/PC	59 unit
2	Laptop	15 unit
3	Personal komputer lain-lain	6 Unit
4	UPS	66 Unit
5	Peralatan jaringan lain-lain	2 Unit
6	Switch hub	2 Unit
7	Wireless access point	2 unit
8	Pesawat telepon	8 unit
9	Alat komunikasi radio SSB	8 Unit
10	Unit transceiver VHF portable	20 Unit

Sumber: Data Olahan Dinas Kominfo Kepulauan Riau

Ketersediaan teknologi di Kepri masih sangat lemah, hal ini dibuktikan dari kurangnya jaringan yang ada di beberapa pulau dan Desa di Kepri. Dari data di atas menunjukkan masih sangat lemahnya infrastruktiur teknologi yang ada di Dinas Kominfo Kepri sendiri. Hal ini menunjukkan :

- a. Upaya penerapan e-gov belum optimal, rintisan baru pada sosialisasi mengenai e-gov yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Belum optimalnya SKPD dalam pengelolaan/update data dan informasi pada website.
- c. Penyebaran informasi hasil pembangunan daerah melalui berbagai media massa belum optimal.

Untuk Kepri Smart Province sendiri belum ada data asset yang dicatat, serta panduan teknis pengelolaan yang belum jelas. Temuan dilapangan Kepri Smart Province menjadi gedung terbengkalai dengan peralatan canggih yang tidak termanfaatkan. Dari hasil wawancara dengan Kabid. Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di PPID KSP sendiri menjelaskan bahwa permasalahan yang ada di KSP adalah SDM dan Infrastruktur jaringan di banyak desa di beberapa Kabupaten/Kota di Kepri belum memadai. Selanjutnya masalah ketersediaan data yang semestinya menjadi tugas KSP untuk menyediakan juga belum dipenuhi oleh OPD yang ada di Kepri sendiri

sehingga tidak bisa memenuhi layanan masyarakat terkait kebutuhan data.

Faktor Institusional

Era demokrasi dan reformasi menuntut Pemerintah Provinsi untuk menyediakan layanan yang inovatif, perbaikan efisiensi administrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Hal tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempercepat layanan kepada masyarakat, menghemat waktu dan biaya.

Dari penjelasan PPID di Kominfo Kepri untuk Provinsi Kepulauan Riau masalah yang dihadapi terkait integrasi data dan aplikasi yakni :

- a. Sistem informasi / sumber data masih tersebar di setiap SKPD pengelola maupun penyelenggara kegiatan pemerintah dan hak aksesnya masih bersifat lokal;
- b. Duplikasi data terjadi di beberapa pengelola dan penyelenggara sistem informasi pemerintah dan belum terintegrasi;
- c. Sinergi informasi digital antar instansi belum ada;
- d. Validasi data secara elektronik belum dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat;
- e. Keamanan terhadap kerusakan data digital belum terjamin;
- f. Ego sektoral organisasi sebagai pemilik data.

Dari masalah tersebut menggambarkan bahwa masih lemahnya integrasi data dan aplikasi di Kepri. Ditambah dengan ego sektoral OPD secara institusi yang masih mempertahankan datanya agar tidak bisa diakses oleh publik.

Faktor Manusia

Penerapan E-Government juga harus ditunjang dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur manusia. Karena jika infrastruktur manusia tidak diperhatikan maka penerapan E-Government tidak dapat tercapai dengan baik. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur manusia adalah

sikap aparatur dalam penerapan E-Government, aparatur tersebut harus memiliki pengetahuan serta skill yang memadai, juga membudayakan berbagi informasi yang mendukung penerapan E-Government (Indrajit, 2002).

Untuk mendukung Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sarana pendukung lainnya. Sampai 31 Desember 2017, jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 98 orang terdiri dari PNS sebanyak 33 orang, PTT sebanyak 16 orang dan THL sebanyak 49 orang.

Data diatas menunjukkan masih banyaknya kebutuhan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi, hal ini juga menunjukkan lemahnya kualitas SDM yang ada dan kurangnya SDM yang memang berlatar belakang pendidikan serta memiliki soft skill di bidang komunikasi dan Informatika.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan yakni tentang *e-readines* pemerintah provinsi kepulauan riau dalam penerapan e-government khususnya dalam pelaksanaan *Kepri smart province* , bahwa temuan penelitian ini menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan *Kepri smart province* masih memiliki kelemahan atau belum *ready* (siap) di semua faktor yang dilihat dari penelitian ini seperti faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional. Pada faktor teknologi mengerucut pada sarana dan prasarana teknologi yang masih minim, sedangkan pada faktor manusia kecenderungannya pada kemampuan penyelenggara dalam hal ini sumber daya manusia yang mengelola dan menjalankan program KSP, serta untuk faktor institusional yang menjadi kelemahan utama adalah belum adanya regulasi daerah sebagai penguatan koordinasi antar kelembagaan masing-masing perangkat daerah

untuk saling berintegrasi data dan informasi public

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun .2009.Teknologi Informasi Administrasi. Bandung, Alfabeta.
- Government Of India, Ministry Of Urban Development. 2015. Smart Cities Mission Statement & Guidelines. Official Report Of Smart City Mission Transformation On June, 2015.
- Indrajit, Richardus E. (2002) Electronic Government. Yogyakarta, Andi
- Kurniawan, Agung. (2005) Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta, Pembaruan
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government. Andi Yogyakarta. Yogyakarta
- Thamrin, Husni. 2013. Hukum pelayanan publik di Indonesia. Aswaja Presindo. Yogyakarta
- Azis, Herry Abdul. 2008. "the integration of e-government : challenges, policies and implementation". Jakarta : public services and e-government conference, Bappenas, on Dec 19th 2008.
- Lauranti, Maria., Afrina, Eka., Mawesti,Dia., et.al., (2017). Mengkaji Penggunaan e-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa
- Stevanus, wijaya dkk. 2006. Kajian teoritis :model e-governmet readiness pemerintah kabupaten/kotamadya da keberhasilan e-government". Yogyakarta : seminar nasional aplikasi teknologi informasi 2006, Juni 2006.
- Kencono, Dewi Sekar. 2017. Analisis Struktur Kelembagaan Penyelenggara E-Goverment Pada Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2013. Semarang: Politika Jurnal Ilmu Politik.
- Intruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017